



LAPORAN

PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

SISTEM LAYANAN PENGADUAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI PROVINSI PAPUA (SILAPATI)

OLEH :

NAMA : NEHSEH BANGUN

NIP : 19640424 198603 1 002

NDH : 26

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III
TAHUN 2018**

ABSTRAK

"Sistem Layanan Pengaduan Cepat Berbasis Teknologi Informasi Di Provinsi Papua (Silapati)"

Oleh

Nehseh Bangun

Papua memiliki luas area sekitar 421.981 kilometer persegi dengan jumlah populasi penduduk hanya sekitar 2,3 juta jiwa. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi, dan sebagian dari pegunungan tersebut diliputi oleh salju. Perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini ditandai dengan 141 garis bujur timur yang memotong pulau Papua dari utara ke selatan.

Provinsi Papua dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua. Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, maka dibentuk Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Papua serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Kabupaten/Kota.

Saat ini reformer bekerja pada Inspektorat Provinsi Papua sebagai Pejabat Fungsional Auditor Madya yang memiliki salah satu tugas pokok dan fungsi, yaitu pelaksanaan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Daerah dan Kasus Pengaduan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Fungsional Auditor Madya, reformer melihat permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengaduan, di mana sistem pengaduan dari masyarakat tentang Kinerja Pemerintah adalah secara manual. Mengingat letak geografis Provinsi Papua yang sangat luas dengan jarak/waktu tempuh yang lama, mengakibatkan pengaduan masyarakat lama diterima pihak APIP serta data tidak akurat.

Sehubungan dengan hal di atas, diperlukan Sistem Layanan Pengaduan yang cepat, maka reformer melakukan inovasi layanan pengaduan dengan membuat "Sistem Layanan Pengaduan Cepat Berbasis Teknologi Informasi" (SILAPATI).

Diharapkan informasi pengaduan masyarakat dapat lebih cepat ditindaklanjuti.